

**Judul** : Pembatasan dinilai jadi jalan tengah  
**Tanggal** : Senin, 15 Agustus 2022  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 1 dan 7

# Pembatasan Dinilai Jadi Jalan Tengah

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO, INTAN PRATIWI

**JAKARTA** — Membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga lebih dari Rp 500 triliun membuat pemerintah dalam posisi dilematis. Langkah menaikkan atau menahan harga BBM sama-sama memiliki risiko yang cukup besar. Pembatasan konsumsi sekaligus memastikan pengguna BBM bersubsidi tepat sasaran dinilai menjadi jalan tengah untuk memastikan APBN tidak terlalu terbebani dan menjaga inflasi terkendali.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai kenaikan harga BBM pasti akan meningkatkan inflasi dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dan beriringan. Salah satunya dengan mendorong perubahan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Revisi Perpres 191/2014 agar ada payung hukum untuk mengatur para pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya,” kata dia saat dihubungi *Republika*, Ahad (14/8).

Eddy menilai perlu ada pembatasan terhadap konsumen BBM subsidi, misalnya melalui kontrol pembelian volume, jenis kendaraan, teknologi, dan lain-lain. Kemudian, secara struktural perlu ada perombakan atas mekanisme pemberian subsidi, dari subsidi produk ke subsidi orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan bahwa anggaran subsidi energi tahun ini membengkak menjadi Rp 502 triliun. Menurut Jokowi, nilai subsidi itu sudah terlalu besar dan pemerintah belum tentu bisa menahan beban tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Jokowi mengatakan, subsidi energi sebesar Rp 502 triliun digelontorkan pemerintah untuk menahan kenaikan BBM jenis Pertalite, gas, dan listrik. Menurut dia, angka itu sangat besar. Dia

*Bersambung ke hlm 7 kol 1-4*

*Pembatasan Dinilai Jadi Jalan Tengah ..... dari hlm 1*

menyebut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum tentu bisa mempertahankan subsidi kepada masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Apalagi, harga BBM di banyak negara telah mencapai dua kali lipat.

"Tapi, kalau bisa (memperhatikan harga BBM subsidi), ya, alhamdulillah, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi, kalau memang APBN tidak kuat, bagaimana?" kata Jokowi.

Hingga saat ini, pemerintah belum kunjung menyelesaikan revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur kriteria penerima BBM bersubsidi. Payung hukum itu menjadi landasan utama untuk bisa tersalurkan barang subsidi, yaitu BBM, LPG, bahkan listrik, kepada masyarakat yang berhak.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai penyaluran barang subsidi secara tepat akan mengurangi beban APBN. "Memang seharusnya prinsip subsidi ini *kan* disalurkan ke tepat sasaran. Perlu pembatasan agar menghindari yang tidak layak dapat subsidi yang tidak layak dapat subsidi," ujar Faisal.

Namun, karena tak kunjung

keluarnya regulasi mengenai pembatasan konsumsi, Faisal menilai maka jalan terbaik adalah menambah subsidi di APBN. Menurut dia, penambahan subsidi tak lantas membuat APBN jebol. Meski secara belanja subsidi membengkak, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan *windfall profit* yang dikantongi pemerintah dari kenaikan harga komoditas.

Faisal mencatat, APBN semester satu tahun ini surplus Rp 73 triliun. Kondisi itu masih lebih baik dari kondisi tahun lalu yang defisit Rp 270 triliun. Tahun ini, target defisit APBN sebesar 4,85 persen. Namun, dengan kondisi kenaikan harga komoditas yang menambah *windfall profit*, defisit APBN diturunkan jadi 3,9 persen.

"APBN jauh lebih baik kondisinya saat ini dibandingkan tahun lalu. Kalau kemudian ada opsi menambah kuota subsidi maka beban belanja subsidi akan bertambah, BBM khususnya. Tapi, ini tidak lantas membuat APBN defisitnya melewati target," ujar Faisal.

Faisal menilai langkah menaikkan harga BBM, khususnya Pertalite atau Pertamax sekalipun, malah akan memperburuk

pertumbuhan ekonomi. Sebab, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada inflasi.

"Saat ini target inflasi kita antara 4-5 persen. Tapi, jika harga BBM naik lagi, bukan tidak mungkin inflasi bisa naik jadi 6 persen. Harga Pertalite penggunaannya luas dan memengaruhi harga barang lainnya, termasuk harga pokok," ujar Faisal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, kemungkinan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun tahun ini tidak akan cukup. Pasalnya, kuota volume BBM yang disubsidi menipis sehingga memerlukan penambahan kuota.

"Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum lagi harga minyak dunia yang masih belum stabil," ujar Sri Mulyani.

Kondisi kenaikan beban subsidi ini akhirnya direspons oleh pemerintah dengan membuka opsi kenaikan harga jual BBM. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.

"Jadi, tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat

bahwa rasa-rasanya *sih* untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, *feeling* saya, harus kita siap-siap kalau, katakanlah, kenaikan BBM itu terjadi," ujar Bahlil.

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, melihat ada tiga kekhawatiran jika BBM dinaikkan. Pertama, kata dia, kenaikan harga BBM pasti akan memukul daya beli masyarakat yang selama ini sudah tergerus selama pandemi. Kekhawatiran kedua, efek berantai terhadap kenaikan biaya produksi.

Ketiga, kata Hendrawan, kenaikan harga dikhawatirkan dapat mengguncang stabilitas sosial dan politik. "Ini memang dilematis. Dinaikkan berat, tidak dinaikkan juga berat," ujar dia.

Menurut politikus PDIP ini, subsidi terus membengkak seiring dengan melebarnya jarak antara harga pasar dan asumsi harga di APBN. Sementara itu, subsidi BBM saat ini tetap dipertahankan untuk menekan laju inflasi. Hendrawan berharap pemerintah tetap bijaksana. Walaupun harga dinaikkan, ia berpesan agar pemerintah tidak menaikkan harga terlalu drastis.

"Hanya memang, kita tahu, subsidi kepada barang sering salah sasaran karena yang kaya juga dapat subsidi," ujar dia.

■ ed: mas alamil huda